

RENCANA KERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT. atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo tahun 2023. Renja merupakan dokumen perencanaan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode satu tahun.

Rencana Kerja (RENJA) ini memuat target capaian RENJA tahun 2023, evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2022 dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, *review* terhadap perencanaan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Selain itu juga memuat tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Kami berharap Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Ponorogo tahun 2023 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Ponorogo.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO



Drs. SUKO KARTONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660405 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	6
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	7
2.4 Review terhadap Perencanaan Awal RKPD	8
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	9
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	11
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	11
3.2. Tujuan dan Sasaran.....	11
3.3 Program dan Kegiatan.....	13
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	18
BAB V PENUTUP	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Aloon-Aloon Utara Nomor 6, Telepon (0352) 483 852,

Faksimile (0352) 483 852, Kode Pos (63413),

Website: [https:// bakesbangpol.ponorogo.go.id/](https://bakesbangpol.ponorogo.go.id/), Email: bakesbangpol_po@yahoo.com

P O N O R O G O

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR: 188.45/ /405.28/2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo, maka perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dengan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2010 - 2025 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2022 adalah Rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2022

Pasal 2

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 3

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN YANG LALU.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

TC. 29

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

TC. 30

2.3 Isu – isu penting pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPDP

TC. 31

2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan SKPD

TC. 32

2.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

TC. 33

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2022

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

TC. 33

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

- 4 -

Pasal 4

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai Pedoman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2022.


Pasal 5

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO




Drs. SUKO KARTONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660405 198602 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 menyusun Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2023. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk tahun 2023.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo melakukan penyusunan Renja SKPD tahun 2023 dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Ponorogo.

Digunakannya substansi sasaran dan formula indikator Renstra dan RPJMD Tahun 2021 - 2026 sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD tahun 2023 didasarkan oleh alasan sebagai berikut :

1. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja tahun 2023 masih berpedoman kepada Permendagri Nomor : 86 Tahun 2017 dan indikator SPM yang dikeluarkan oleh kementerian teknis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja SKPD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD tahun 2023 yang menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No . 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 - 2025;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah ;

- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 ;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 adalah menyediakan arah acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan adalah agar terdapat sinerginitas dan kontinuitas dalam perencanaan program dan kegiatan di Kabupaten Ponorogo.

1.4. Sistematika penulisan.

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang penyusunan Renja
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
TC. 29
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
TC. 30
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
TC. 31
 - 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan SKPD
TC. 32
 - 2.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
TC. 33

BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas program dan kegiatan berdampak kepada penapaian indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Renstra dan telah diperjanjikan didalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Pengukuran dilakukan terhadap indikator program maupun kegiatan tahun berjalan, tahun sebelumnya serta proyeksi tahun yang akan datang secara keseluruhan kami tuangkan ke dalam tabel TC. 29.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis tersebut maka perlu dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan di dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo, adapun hasilnya sebagaimana tertuang ke dalam tabel TC. 30.

Realisasi belanja APBD Tahun 2021 sebagaimana dilihat pada tabel berikut :

Berdasarkan hasil laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo, dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021, belanja SKPD dikelompokkan dalam Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:

- A. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai (Rp.2.403.383.648), Belanja Barang Jasa (Rp. 1.755.844.821), dan Belanja Hibah (Rp. 1.677.532.000).
- B. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rp. 86.845.000)

Perincian anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Belanja Operasi	6.040.853.622	5.836.760.469	96,6
	Belanja Pegawai	2.474.887.000	2.403.383.648	97,1
	a. Belanja Barang dan Jasa	1.888.434.622	1.755.844.821	92,9
	b. Belanja Hibah	1.677.532.000	1.677.532.000	100
2.	Belanja Modal	87.750.000	86.845.000	98,6
	a. Belanja modal peralatan dan mesin	87.750.000	86.845.000	98,6
	Jumlah	6.128.603.622	5.923.605.469	95,2

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis merupakan masalah yang saling berhubungan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Secara umum permasalahan yang masih dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

1. Konflik ekonomi sebagai akibat dari kemajuan teknologi;
2. Konflik keagamaan yang disebabkan oleh dinamisasi aliran dalam kehidupan beragama dan aliran kepercayaan;
3. Konflik antar etnis;

A. Permasalahan.

- ❖ Terkait dengan sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi baik yang bersifat eksternal maupun internal sehingga keamanan dan ketenteraman di masyarakat akan tercapai.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain :

1. Adanya konflik keagamaan yang disebabkan oleh dinamisasi aliran dalam kehidupan beragama dan aliran kepercayaan ;
 2. Konflik yang terjadi karena adanya gesekan antar perguruan silat dan bela diri yang ada di Kabupaten Ponorogo ;
 3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya wawasan kebangsaan mengingat semakin kompleksnya persoalan yang ada dalam keberagaman masyarakat ;
- ❖ Sasaran Strategis kedua yaitu : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi baik yang bersifat eksternal maupun internal sehingga partisipasi masyarakat dalam politik akan meningkat.
- Beberapa permasalahan yang muncul antara lain :
1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Peraturan Perundang-undangan dalam hal pendirian ORMAS dan LSM.
 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

B. Hambatan.

Hambatan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo ke depan dalam upaya meningkatkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Faktor geografis yang luas sehingga jangkauan dalam pengawasan kepada warga masyarakat terbatas ;
2. Kesadaran warga masyarakat dalam partisipasi politik masih rendah.

2.4 Review terhadap Perencanaan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawali program / kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rancangan awal RKPD yang telah disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Ponorogo telah mengakomodir semua program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Keselarasn Program dan Kegiatan nampak baik dalam jumlah maupun indikator yang terdapat dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Penyusunan Renja SKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dalam dokumen rencana kerja memuat informasi rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo. Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Proses penyusunan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 di dasarkan pada RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2022, agar di dalam pelaksanaan Program serta Kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Selanjutnya identifikasi atas rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan di konsolidasikan dengan KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan RKA SKPD sebagaimana tersebut dalam tabel T-C 31.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo maka untuk perencanaan program dan kegiatan tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena

hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas, utamanya terkait dengan terpeliharanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan di masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Usaha-usaha yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang hendak dicapai, diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Selain itu keamanan dan ketentraman yang merupakan salah satu pendukung tercapainya pola pembangunan di suatu wilayah / daerah adalah menjadi prioritas utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo guna mendukung tercapainya keseluruhan program-program Bupati dan Wakil Bupati dalam periode 5 tahun.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai unit pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dibutuhkan dan perlu ditetapkan strategi kebijakan program dan kegiatan. Strategi kebijakan yang ditetapkan adalah menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi dengan Suprastruktur politik dan infrastruktur politik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Forkopimda dan Dinas terkait dalam upaya untuk deteksi dini dan cegah dini untuk menciptakan situasi yang kondusif, menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Forkopimda dan Dinas terkait dalam upaya untuk deteksi dini dan cegah dini untuk menciptakan situasi yang kondusif.

Dalam rangka mewujudkan kebijakannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tujuan, sasaran dan beberapa program yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan dimana pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023.

a) Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi. Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah :

“ Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan situasi keamanan yang kondusif “

Dengan indikator : Prosentase kejadian terkait Poleksosbud yang dapat diegah.

b) Sasaran.

Adapun sasaran yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah :

1. “ Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat “.

Indikator sasaran :

1. Prosentse masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan..
2. Frekuensi penuelenggaraan Forum Antar Umat Beragama.
3. Prosentase potensi konflik yang ditindaklanjuti 1 x 24 jam.

2. “ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik “

Indikator sasaran :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik:
 - Pilpres
 - Pilgub
 - Pilbup
 - Pileg

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja tahun 2023 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 :

“ Meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat “

Sasaran tersebut dicapai dengan 3 Program , 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud adalah :

- I. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
 - 1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi di bidang Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan.
- II. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 1. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
 - 1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukuan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - 1.2. Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- III. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

- 1.1. Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah .
- 1.2. Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran 2 :

“ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik “

Sasaran tersebut dicapai dengan 2 Program , 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan. Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah :

- I. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
 1. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik.
 - 1.1. Sub Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik.
 - 1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik.
 - 1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan dan partai politik,

pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik.

II. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

1. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah.

III. Program-program penunjang yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD

1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD

1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD

1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD

1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

2.3. Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD.

2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
 - 3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor.
 - 4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 4.3. Penyediaan Peralatan rumah Tangga.
 - 4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan.
 - 4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 5.2. Pengadaan Mebel.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 7.3. Pemeliharaan Mebel.
 - 7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- 7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.
- 7.6. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor/Bangunan Lainnya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023, maka disusun rencana kerja serta usulan pendanaan sebagaimana terlampir dalam Form :

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				catatan penting				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8				
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
8	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten Ponorogo		3.338.294.512,00	APBD	
8	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kabupaten Ponorogo		22.056.000,00	APBD	
8	01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo	3.180.000,00	APBD	
8	01	01	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Ponorogo	4.000.000,00	APBD	

KODE						Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				catatan penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8
8	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Ponorogo		4.000.000,00	APBD	
8	01	01	2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kabupaten Ponorogo		3.696.000,00	APBD	
8	01	01	2	01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Ponorogo		4.000.000,00	APBD	
8	01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Ponorogo		3.180.000,00	APBD	
8	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kabupaten Ponorogo		2.151.651.800,00	APBD	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				catatan penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8
8	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Ponorogo		2.070.771.000,00	APBD	
8	01	01	2	02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Ponorogo		74.040.800,00	APBD	
8	01	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Ponorogo		3.180.000,00	APBD	
8	01	01	2	02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kabupaten Ponorogo		3.660.000,00	APBD	
8	01	01	2	05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Kabupaten Ponorogo		128.600.000,00	APBD	
8	01	01	2	05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Ponorogo		28.600.000	APBD	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				catatan penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8
8	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Ponorogo		100.000.000	APBD	
8	01	01	2	06		Administrasi umum perangkat daerah		Kabupaten Ponorogo		285.503.000,00	APBD	
8	01	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kabupaten Ponorogo		6.196.000,00	APBD	
8	01	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Ponorogo		49.000.000,00	APBD	
8	01	01	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kabupaten Ponorogo		21.958.000,00	APBD	
8	01	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kabupaten Ponorogo		123.632.800,00	APBD	
8	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kabupaten Ponorogo		15.382.200,00	APBD	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				catatan penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8
8	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kabupaten Ponorogo		9.360.000,00	APBD	
8	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			59.974.000,00	APBD	
8	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Kabupaten Ponorogo		509.600.000,00	APBD	
8	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Ponorogo		500.000.000,00	APBD	
8	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	Kabupaten Ponorogo		9.600.000,00	APBD	
8	01	01	2	08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kabupaten Ponorogo		10.365.000,00	APBD	
8	01	01	2	08	01	Penyediaan surat menyurat	Jumlah surat masuk / surat keluar yang dikelola	Kabupaten Ponorogo		2.500.000	APBD	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				catatan penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8
8	01	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan pembayaran listrik, air dan telepon	Kabupaten Ponorogo		7.865.000	APBD	
8	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara				230.518.712,00	APBD	
8	01	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Ponorogo		77.683.012,00	APBD	
8	01	01	2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Ponorogo		5.000.000,00	APBD	
8	01	01	2	09	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kabupaten Ponorogo		10.000.000,00	APBD	
8	01	01	2	09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kabupaten Ponorogo		8.835.700,00	APBD	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				catatan penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8
8	01	01	2	09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kabupaten Ponorogo		134.000.000,00	APBD	
8	01	01	2	09	11	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kabupaten Ponorogo		-	APBD	
8	01	03				Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Prosentase Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam politik	Kabupaten Ponorogo		3.285.302.000,00	APBD	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			catatan penting	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)		Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7	8
8	01	03	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Kabupaten Ponorogo		3.285.302.000,00	APBD	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			catatan penting	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)		Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7	8
8	01	03	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Ponorogo		2.985.302.000,00	APBD	

KODE						Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				catatan penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8
8	01	03	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Ponorogo		300.000.000,00	APBD	
8	01	04				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Ormas dan LSM yang Aktif	Kabupaten Ponorogo		288.050.000,00	APBD	
8	01	04	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Kabupaten Ponorogo		288.050.000,00	APBD	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				catatan penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8
8	01	04	2	01	03	Pelaksanaan Koordinasi Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Ponorogo		288.050.000,00	APBD	
8	01	02				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Ponorogo		100.000.000,00	APBD	
8	01	02	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Kabupaten Ponorogo		100.000.000,00	APBD	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				catatan penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8
8	01	02	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Ponorogo		100.000.000	APBD	
8	01	05				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Frekuensi Penyelenggaraan Forum Antar Umat Beragama	Kabupaten Ponorogo		150.000.000,00	APBD	
8	01	05	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Kabupaten Ponorogo		150.000.000,00	APBD	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				catatan penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8
8	01	05	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Ponorogo		100.000.000	APBD	
8	01	05	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Ponorogo		50.000.000	APBD	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			catatan penting	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)		Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7	8
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Prosentase Potensi Konflik yang Ditindaklanjuti 1 x 24 Jam	Kabupaten Ponorogo		1.588.860.000,00	APBD	
8	01	06	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Kabupaten Ponorogo		1.588.860.000,00	APBD	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			catatan penting	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)		Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7	8
8	01	06	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Ponorogo		350.000.000,00	APBD	
8	01	06	2	01	06	Peraturan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Ponorogo		1.238.860.000,00	APBD	
Jumlah										8.755.506.512		

Tabel TC. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s/d Tahun 2023 Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s/d tahun berjalan					
					Target Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Urusan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat														
8	1	2			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Kebangsaan	75%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	100%
8	1	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			100%	100%	100%	100%	100 Peserta	100 Peserta	100%
8	1	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	100%	100%	100%	100%	50 Peserta	50 Peserta	100%
8	1	3			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan etika serta Budaya Politik	Prosentase Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Politik	0%	72%	-	-	0%	-	0%	0%
8	1	3	2.01		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, peningkatan Demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.			72%	-	-	0%	-	0%	0%
8	1	3	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2000 Orang	10 Parpol	10 Parpol	10 Parpol	100%	10 Parpol	10 Parpol	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s/d tahun berjalan					
					Target Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
8	1	3	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan dan Partai Politik Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	21 Laporan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100%	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100%
8	1	4			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Ormas dan LSM yang Aktif	45%	21%	45%	45%	100%	50%	50%	100%
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			21%	45%	45%	100%	100 Orang	100 Orang	100%
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Koordinasi Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	-	45%	42%	93%	100 Orang	100 Orang	100%
8	1	5			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Frekuensi Penyelenggaraan Forum Antar Umat Beragama	2 Kali	4 Kali	4 Kali	3 Kali	75%	4 Kali	4 Kali	100%
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya			4 Kali	4 Kali	3 Kali	75%	-	-	100%
8	1	5	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	1 Kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s/d tahun berjalan	
					Target Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1.5.2.02.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan	3 Kali	3 Kali	2 Kali	70%	2 kali	2 kali	100%
8.1.6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Prosentase Potensi Konflik yang Ditindaklanjuti 1 x 24 Jam	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
8.1.6.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			100 %	100 %	100 %	100%	-	-	100%
8.1.6.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah		35 Laporan	70 Laporan	192 Laporan	274%	70 Laporan	70 Laporan	100%
8.1.6.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	11 Laporan	12 Kali	12 Kali	11 Kali	92%	11 Kali	11 Kali	100%

Ponorogo,.....2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ponorogo
SUKO KARTONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19660405 198602 1 004

Tabel TC 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ponorogo

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (tnn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Angka Kriminalitas	-	-	285 Kasus	280 Kasus	275 Kasus	270 Kasus	188 Kasus	-	275 Kasus	270 Kasus	
2	Prosentase Potensi Konflik yang dapat diredam	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Tingkat Partisipasi Politik											
	- Pilpres						78%				78%	
	- Pileg						78%				78%	
	- Pilgub						77%				77%	
	- Pilbup						77%				77%	

Tabel T-C .31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
	BIDANG KESBANG				1.311.120.000	BIDANG KESBANG				1.838.860.000	
1	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Ponorogo	Prosentase Masyarakat yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Kebangsaan		-	1 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Ponorogo	Prosentase Masyarakat yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Kebangsaan	75%	100.000.000	
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Ponorogo			-	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Ponorogo			100.000.000	
	1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		-	1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	100.000.000	
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kabupaten Ponorogo	Frekuensi Penyelenggaraan Forum Antar Umat Beragama		28.800.000	2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kabupaten Ponorogo	Frekuensi Penyelenggaraan Forum Antar Umat Beragama	2 Kali	150.000.000	
	1 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Kabupaten Ponorogo			28.800.000	1 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Kabupaten Ponorogo			150.000.000	
	1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika , Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		-	1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika , Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	100.000.000	
	2 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika , Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		28.800.000,00	2 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika , Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	50.000.000	
3	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Prosentase Potensi Konflik yang Ditindaklanjuti 1 x 24 Jam		1.282.320.000	3 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Prosentase Potensi Konflik yang Ditindaklanjuti 1 x 24 Jam	1	1.588.860.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Ponorogo			1.282.320.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Ponorogo			1.588.860.000	
	1 Pelaksanaan koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, kerja sama Intelejen, Pemantauan orang asing, Tenaga kerja asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitas kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah (Tim Kewaspadaan Dini)	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah		43.460.000	1 Pelaksanaan koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, kerja sama Intelejen, Pemantauan orang asing, Tenaga kerja asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitas kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah (Tim Kewaspadaan Dini)	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah		350.000.000	
	2 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota		1.238.860.000	2 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	11 Laporan	1.238.860.000	
	BIDANG SOSPOL				2.773.352.000	BIDANG SOSPOL				3.573.352.000	
4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIKDAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.	Kabupaten Ponorogo	Prosentase Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Politik		2.685.302.000	4 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIKDAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.	Kabupaten Ponorogo	Prosentase Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Politik		3.285.302.000	
	1 Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, peningkatan Demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan , perwakilan dan partai Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Kabupaten Ponorogo			2.685.302.000	1 Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, peningkatan Demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan , perwakilan dan partai Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Kabupaten Ponorogo			3.285.302.000	
	1 Pelaksanaan koordinasi dibidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, peningkatan Demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan , perwakilan dan partai Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		2.685.302.000	1 Pelaksanaan koordinasi dibidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, peningkatan Demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan , perwakilan dan partai Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2000 Orang	2.985.302.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, peningkatan Demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan , perwakilan dan partai Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		-	2 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, peningkatan Demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan , perwakilan dan partai Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	21 Laporan	300.000.000	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kabupaten Ponorogo	Prosentase Ormas dan LSM yang Aktif		88.050.000	5 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kabupaten Ponorogo	Prosentase Ormas dan LSM yang Aktif	45%	288.050.000	
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Kabupaten Ponorogo			88.050.000	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Kabupaten Ponorogo			288.050.000	
	1 Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing didaerah (pembentukan tim)	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		88.050.000,00	1 Pelaksanaan Koordinasi dibidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing didaerah (pembentukan tim)	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	288.050.000	
	SEKRETARIAT				3.088.294.512	SEKRETARIAT				3.343.294.512	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kabupaten Ponorogo			3.088.294.512	6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kabupaten Ponorogo			3.343.294.512	
	1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo			22.056.000	1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo			22.056.000	
	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.180.000	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.180.000	
	2 Koordinasi dan penyusunan RKA SKPD	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		4.000.000	2 Koordinasi dan penyusunan RKA SKPD	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4.000.000	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	
	4 Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD		3.696.000	4 Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.696.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		4.000.000	5 Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	
	6 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3.180.000	6 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	3.180.000	
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo			2.151.651.800	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo			2.151.651.800	
	1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2.070.771.000	1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	2.070.771.000	
	2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		74.040.800	2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		74.040.800	
	3 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3.180.000	3 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.180.000	
	4 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD		3.660.000	4 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	4 Laporan	3.660.000	
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo			128.600.000	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo			128.600.000	
	1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		28.600.000	1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	28.600.000	
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100.000.000	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Pegawai	100.000.000	
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo			285.503.000	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo			285.503.000	
	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		6.196.000	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	6.196.000	
	2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		49.000.000	2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	49.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		21.958.000	3 Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket	21.958.000	
	4 Penyediaan bahan logistik kantor	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		123.632.800	4 Penyediaan bahan logistik kantor	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	123.632.800	
	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		15.382.200	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	15.382.200	
	6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		9.360.000	6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Paket	9.360.000	
	7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		59.974.000	7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	59.974.000	
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Ponorogo			259.600.000	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Ponorogo			509.600.000	
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		250.000.000	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Paket	500.000.000	
	2 Pengadaan Mebel	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Mebel yang disediakan		9.600.000	2 Pengadaan Mebel	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Mebel yang disediakan	1 Paket	9.600.000	
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Ponorogo			10.365.000	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Ponorogo			10.365.000	
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.500.000	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Ponorogo	Jumlah surat masuk / surat keluar yang dikelola	1 Laporan	2.500.000	
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		7.865.000	2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah laporan pembayaran listrik, air dan telepon	12 Laporan	7.865.000	
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Kabupaten Ponorogo			230.518.712	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Kabupaten Ponorogo			235.518.712	
	1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya		77.683.012	1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	2 Kendaraan	77.683.012	
	2 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5.000.000	2 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Kendaraan	5.000.000	
	3 Pemeliharaan mebeleur	Kabupaten Ponorogo	Jumlah mebel yang dipelihara		-	3 Pemeliharaan mebeleur	Kabupaten Ponorogo	Jumlah mebel yang dipelihara	35 Mebel	10.000.000	
	4 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		8.835.700	4 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	45 Peralatan	8.835.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5 Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		134.000.000	5 Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	134.000.000	
	6 Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		5.000.000	6 Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	-	
					7.172.766.512					8.755.506.512	

Tabel TC-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten ponorogo

Nama Perangkat Daerah : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIDANG KESATUAN BANGSA					1.838.860.000,00				1.414.912.500,00
8 01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Kebangsaan	Kabupaten Ponorogo	75%	100.000.000,00			75%	64.070.000,00
8 01 02 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Kabupaten Ponorogo		100.000.000,00	APBD Kab Ponorogo			64.070.000,00
8 01 02 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Ponorogo	200 Orang	100.000.000,00	APBD Kab Ponorogo		55 Orang	64.070.000,00
8 01 05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Frekuensi Penyelenggaraan Forum Antar Umat Beragama	Kabupaten Ponorogo	2 Kali	150.000.000,00	APBD Kab Ponorogo		2 Kali	83.000.000,00
8 01 05 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Kabupaten Ponorogo		150.000.000,00	APBD Kab Ponorogo			83.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 01 05 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Ponorogo	200 Orang	100.000.000,00	APBD Kab Ponorogo		50 Orang	33.000.000,00
8 01 05 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Ponorogo	1 Laporan	50.000.000,00	APBD Kab Ponorogo		1 Laporan	50.000.000,00
8 01 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Prosentase Potensi Konflik yang Ditindaklanjuti 1 x 24 Jam	Kabupaten Ponorogo	100%	1.588.860.000,00	APBD Kab Ponorogo		100%	1.267.842.500,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	06	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Kabupaten Ponorogo		1.588.860.000,00	APBD Kab Ponorogo			1.267.842.500,00
8	01	06	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	Kabupaten Ponorogo	50 Orang	350.000.000,00	APBD Kab Ponorogo		32 Orang	75.190.000,00
8	01	06	2	01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Ponorogo	11 Laporan	1.238.860.000,00	APBD Kab Ponorogo		60 Laporan	1.192.652.500,00
						BIDANG SOSIAL DAN POLITIK				3.573.352.000,00	APBD Kab Ponorogo			2.110.185.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	03				Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Prosentase Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam politik	Kabupaten Ponorogo		3.285.302.000,00	APBD Kab Ponorogo			1.954.769.000,00
8	01	03	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Kabupaten Ponorogo		3.285.302.000,00	APBD Kab Ponorogo			1.954.769.000,00
8	01	03	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Ponorogo	2000 Orang	2.985.302.000,00	APBD Kab Ponorogo		500 Orang & 10 Parpol	1.775.944.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 01 03 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Ponorogo	21 Laporan	300.000.000,00	APBD Kab Ponorogo		21 Laporan	178.825.000,00
8 01 04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Ormas dan LSM yang Aktif	Kabupaten Ponorogo	45%	288.050.000,00	APBD Kab Ponorogo		45%	155.416.000,00
8 01 04 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Kabupaten Ponorogo		288.050.000,00	APBD Kab Ponorogo			155.416.000,00
8 01 04 2 01 03	Pelaksanaan Koordinasi Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Ponorogo	100 Orang	288.050.000,00	APBD Kab Ponorogo		50 Orang	55.416.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 01 04 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Koordinasi Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Ponorogo	100 Orang	288.050.000,00	APBD Kab Ponorogo		3 Laporan	100.000.000,00
	SEKRETARIAT				3.344.894.512,00	APBD Kab Ponorogo			3.080.548.515,00
8 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten Ponorogo		3.344.894.512,00	APBD Kab Ponorogo			3.080.548.515,00
8 01 01 2 01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Kabupaten Ponorogo		14.056.000,00	APBD Kab Ponorogo			7.208.000,00
8 01 01 2 01 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo	1 Dokumen	3.180.000,00	APBD Kab Ponorogo		1 Dokumen	3.708.000,00
8 01 01 2 01 02	Koordinasi dan penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Ponorogo	1 Dokumen	4.000.000,00	APBD Kab Ponorogo		1 Dokumen	-
8 01 01 2 01 04	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Ponorogo	1 Dokumen	3.696.000,00	APBD Kab Ponorogo		1 Dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 01 01 2 01 06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Ponorogo	1 Dokumen	3.180.000,00	APBD Kab Ponorogo		1 Dokumen	3.500.000,00
8 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kabupaten Ponorogo		2.151.651.800,00	APBD Kab Ponorogo			2.364.568.603,00
8 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Ponorogo	26 Orang	2.070.771.000,00	APBD Kab Ponorogo		26 Orang	2.288.227.803,00
8 01 01 2 02 02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Ponorogo	12 Dokumen	74.040.800,00	APBD Kab Ponorogo		12 Dokumen	72.660.800,00
8 01 01 2 02 05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Ponorogo	1 Laporan	3.180.000,00	APBD Kab Ponorogo		1 Laporan	3.680.000,00
8 01 01 2 02 07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kabupaten Ponorogo	4 Laporan	3.660.000,00	APBD Kab Ponorogo		4 Laporan	-
8 01 01 2 05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Kabupaten Ponorogo		128.600.000,00	APBD Kab Ponorogo			168.600.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	01	2	05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Ponorogo	26 Paket	28.600.000,00	APBD Kab Ponorogo		26 Paket	18.200.000,00
8	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Ponorogo	15 Pegawai	100.000.000,00	APBD Kab Ponorogo		15 Pegawai	150.400.000,00
8	01	01	2	06		Administrasi umum perangkat daerah		Kabupaten Ponorogo		285.503.000,00	APBD Kab Ponorogo			312.605.800,00
8	01	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Ponorogo	1 Paket	6.196.000,00	APBD Kab Ponorogo		1 Paket	6.196.000,00
8	01	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Ponorogo	1 Paket	49.000.000,00	APBD Kab Ponorogo		1 Paket	27.500.000,00
8	01	01	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Ponorogo	2 Paket	21.958.000,00	APBD Kab Ponorogo		2 Paket	54.840.700,00
8	01	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Ponorogo	3 Paket	123.632.800,00	APBD Kab Ponorogo		3 Paket	110.244.700,00
8	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Ponorogo	1 Paket	15.382.200,00	APBD Kab Ponorogo		1 Paket	13.469.400,00
8	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Ponorogo	2 Paket	9.360.000,00	APBD Kab Ponorogo		2 Paket	30.360.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Paket	59.974.000,00	APBD Kab Ponorogo		1 Paket	69.995.000,00
8 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Kabupaten Ponorogo		519.200.000,00	APBD Kab Ponorogo			43.243.500,00
8 01 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Ponorogo	1 Paket	500.000.000,00	APBD Kab Ponorogo			-
8 01 01 2 07 05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Ponorogo	1 Paket	9.600.000,00	APBD Kab Ponorogo		1 Paket	15.027.900,00
8 01 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Ponorogo	1 Paket	9.600.000,00	APBD Kab Ponorogo		4 Unit	28.215.600,00
8 01 01 2 08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Kabupaten Ponorogo		10.365.000,00	APBD Kab Ponorogo			10.976.000
8 01 01 2 08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Ponorogo	1 Laporan	2.500.000,00	APBD Kab Ponorogo		1 Laporan	3.000.000,00
8 01 01 2 08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Ponorogo	12 Laporan	7.865.000,00	APBD Kab Ponorogo		12 Laporan	7.976.000,00
8 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara				235.518.712,00	APBD Kab Ponorogo			173.346.612,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 01 01 2 09 01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perirangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Ponorogo	2 Kendaraan	77.683.012,00	APBD Kab Ponorogo		2 Kendaraan	96.155.506,00
8 01 01 2 09 02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Ponorogo	15 Kendaraan	5.000.000,00	APBD Kab Ponorogo		15 Kendaraan	5.000.000,00
8 01 01 2 09 05	Pemeliharaan mebeleur	Jumlah Mebel yang dipelihara	Kabupaten Ponorogo	35 Mebel	10.000.000,00	APBD Kab Ponorogo			-
8 01 01 2 09 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Ponorogo	45 Peralatan	8.835.700,00	APBD Kab Ponorogo		20 Peralatan	12.191.106,00
8 01 01 2 09 09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kabupaten Ponorogo	1 Unit	134.000.000,00	APBD Kab Ponorogo		1 Unit	60.000.000,00
					8.757.106.512,00				6.605.646.015,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan penjabaran Renstra SKPD yang memberikan gambaran tentang Program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo lebih terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Namun demikian proses pembangunan memerlukan peran serta seluruh masyarakat baik pemerintah, legislatif maupun masyarakat itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kerjasama dari semua pihak sangat diperlukan demi suksesnya pembangunan yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik dimasa datang serta mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman tenteram dan kondusif.

Ponorogo,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN PONOROGO



Drs. SUKO KARTONO, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660405 198602 1 004